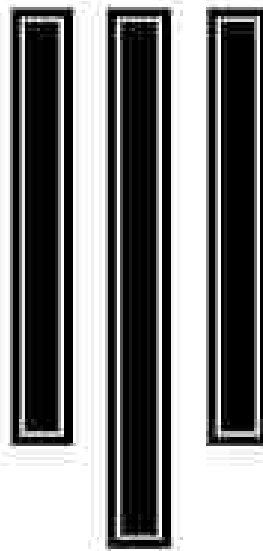




RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau 78512

Alamat Website : www.sanggau.go.id Email : bpkad@sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Sanggau.

Tersusunnya Renja BPKAD Tahun 2024 akan mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dan hasil evaluasi hasil Renja BPKAD tahun lalu serta hasil evaluasi Renja BPKAD tahun berjalan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Mancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sanggau, 15 Agustus 2023

PIH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



ABDUL GANI, S. IP
Pembina Tk. I
NIP 19670311 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD	12
2.3 Isi-Isi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Umulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	25
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	27
BAB V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari proses perencanaan. Apabila perencanaan itu disusun dengan baik dan melibatkan seluruh *stakeholders* dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi, maka pencapaian tujuan yang dicita-citakan akan lebih besar kemungkinannya realisasinya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur penunjang pelaksana kegiatan Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan dapat membuat suatu perencanaan yang komprehensif guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini.

Di era globalisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini tugas yang dijalankan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah semakin berat. Dengan kemandiriannya, Daerah diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaannya dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah semakin meningkat juga, terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut peran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai *leading sector* di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk merespon segala bentuk dinamika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kian kompleks.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

Melalui kebijakan ini, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Rencana Kerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun 2024. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaian program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran yang ditetapkan dan akan dicapai dalam tahun anggaran 2024 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024,

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, dan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi BPKAD sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan anggaran BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Retstra BPKAD Tahun 2020 - 2024;
2. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2024;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan bagi setiap aparatur di lingkungan BPKAD dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sanggau khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Diisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan suatu proses pembangunan di tahun-tahun mendatang akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKAD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
2	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	B

(data tahun 2022)

No	Sasaran	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	SB				100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD		B			B

(data tahun 2022)

SB= Sangat Berhasil, B= Berhasil, CB= Cukup Berhasil, TB= Tidak Berhasil

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja ke-3 (tiga) sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2022 dapat dikategorikan **"Sangat Berhasil"** sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

"Optim BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTF)"

Sasaran ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Badan yang dimulai dari penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran secara terbuka, transparan, tertib dan akuntabel serta tepat waktu dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD sampai dengan triwulan IV tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100	100%
2.	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	65	65	100%
J U M L A H					100%

(Data tahun 2022)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dengan metode rata-rata tertimbang data kelompok dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Sasaran 2 :

"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"

Sasaran ini diarahkan agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan dana APBD yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ditetapkan secara transparan, tertib dan akuntabel.

Keberhasilan yang paling utama dari pelaksanaan sasaran ***"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"*** adalah Nilai AKIP BPKAD.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP BPKAD	%	CC	B	100%
J U M L A H					100%

(Data tahun 2022)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Dana APBD yang dikelola BPKAD dan dianggarkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kedua sasaran di atas adalah sebesar Rp265.358.328.476,00 dan terealisasi sebesar Rp256.001.029.118,00 atau sebesar 96,47%.

Berikut ini terlampir capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebagai berikut:

Kode	Tema Bidang Pembelajaran (Ruang dan Program) Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subsistem) Kegiatan (Program)	Target Kinerja Kegiatan (Program) (Berkas Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Program (Berkas Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023			Program Kegiatan (Ruang dan Program) Kegiatan (Berkas Tahun 2023)		Anggaran 2023	
					Target Kinerja Kegiatan (Program) (Berkas Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Kegiatan (Program) (Berkas Tahun 2023)	Target Kinerja Kegiatan (Program) (Berkas Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Kegiatan (Program) (Berkas Tahun 2023)	Anggaran 2023		
001.001.001.001	Administrasi dan Manajemen Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peningkatan Kualitas	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.002	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.003	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.004	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.005	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.006	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.007	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.008	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.009	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	
001.001.001.010	Manajemen dan Pengelolaan	Manajemen dan Pengelolaan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Bab II pasal 2 yang mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan semakin meningkatkan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pada aspek pelayanan masyarakat. Di sisi lain, kondisi era globalisasi sebagai faktor eksternal merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selaku unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat memberikan dampak yang sangat besar pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat bahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau. Namun di sisi lain sering berubahnya regulasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat dapat memperlambat proses penyaluran dana dan anggaran yang berdampak langsung pada proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD dan pencapaian renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Kabupaten Sanggau

No	Indikator	SPN/ Standar Nasional	SKK	Target Rata-rata Penguasaan Dasar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase laporan kegiatan pembelajaran dalam record DAP yang lengkap sesuai			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Tuntaskan Kemampuan Literasi dan Numerasi Penguasaan Dasar Mata Dasar			65	67	69	70	65	67	69	70	
3	Nilai rata-rata IPS			60	61	62	63	60	61	62	63	

Sarangani, 15 Agustus 2021

ITH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR PUSTAKA

ARDIYANTO, N. 1987.01

ABDUL GANI S. IP

NLP 19670311 198603 1 003

2.3. ISU – ISU PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sanggau. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal berdampak pada pelaksanaan peran BPKAD Kabupaten Sanggau untuk Tahun 2019-2024.

Sebagai sebuah institusi, BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki hal – hal sebagai berikut:

- **TANTANGAN/ANCAMAN**

1. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
2. Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan.
3. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*.
6. Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal.
7. Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal.

- **PELUANG**

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.
3. Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- **KEKUATAN**

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klasifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang diberikan.
3. Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.

- **KELEMAHAN**

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah.
2. Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program / kegiatan pembangunan daerah.
3. "Aset idler" (kekayaan/Aset daerah yang belum dimanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas.
4. Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
- Sumber Daya Manusia yang tersedia berlatarbelakang ketumuhan, memiliki pangkat, pendidikan dan pelatihan. - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Tugas dan Wewenang yang diberikan. - Ketersediaan sarana Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.	- Perluasan cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah beridentitas pada pengelolaan dana belanja, perawatan, pelaksanaan, penelaahan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah. - Kelangkaan tenaga daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program / kegiatan pembangunan daerah. "Aset liar" (kekayaan/ Aset daerah yang belum termanifestasikan belum teridentifikasi secara jelas. - Keterbatasan tenaga dalam proses masih sangat kuat.
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
- Suara informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam pemecahan permasalahan, penyalahsahan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat, efisien, transparan dan akuntabel. - Kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan. - Integrasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan. - Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	- Akurasi data dan kecepatan waktu penyusunan anggaran belanja. - Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan. - Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset. - Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset. - Tuntutan transparansi informasi publik sesuai good governance. - Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal. - Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal.

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan urusan keuangan pemerintahan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal	Regulasi Barang Milik Daerah yang belum memadai Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara optimal	- Kebijakan peraturan Barang Milik Daerah yang tersedia belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini. - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya menerapkan 3 unsur penting yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. - Pemantauan Barang Milik Daerah yang belum optimal dan sesuai regulasi yang ada - Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah seperti sertifikat, BPKA, NPWD dan BAST khusus Barang Milik Daerah tidak.
2	Belum tersedianya Aplikasi Keuangan dan Pengelolaan Aset yang terintegrasi	Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Kualitas SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SDM Penatausahaan Aset pada Perangkat Daerah belum memadai. - Adanya pergantian petugas akuntansi dan penyusun laporan keuangan karena promosi dan mutasi dimana pemugasan ASN bukanlah wewenang dari BPKAD melainkan BKPSDM.

5	Pemenuhan Keuangan Pemerintah Daerah belum maksimal	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD	• Kualitas SDM pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. • Kualifikasi pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran banyak yang tidak memenuhi syarat. • Diumudanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
---	--	--	---

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset.
2. Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik.
3. Pemepai yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah.
4. Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas.
5. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
6. Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan.
7. Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja.
8. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban bulanan skpd.

Bertitik tolak dari isu-isu strategis Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Sanggau, maka ditetapkan beberapa isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sanggau.
3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
4. Kualitas pelayanan publik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada RKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tidak mengalami Perubahan yang signifikan dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2019-2024, namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau.

Untuk selengkapinya, review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sanggau

PEMERINTAH KABUPATEN : BIDANG PERENCANAAN KEBUDAYAAN DAN ARTIS BAKERAI

No	Rancangan Awal RKPD				Rincian Kegiatan				Catatan
	Program/ Kegiatan	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikasi	Program/ Kegiatan	Subsidi	Indikator Kinerja	
1	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian
2	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian
3	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian
4	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian
5	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Program Pembangunan Infrastruktur	Target Capaian	Page Indikasi	Program Pembangunan Infrastruktur	Subsidi	Indikator Kinerja	Target Capaian

[illegible]

Majelis Pendidikan Kabupaten											
No	Program/Regulasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Revisi/Status Data	Catatan Penting
42	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	42 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	42 - 2.000.000.000.000	
43	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	43 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	43 - 2.000.000.000.000	
44	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	44 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	44 - 2.000.000.000.000	
45	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	45 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	45 - 2.000.000.000.000	
46	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	46 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	46 - 2.000.000.000.000	
47	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	47 - 2.000.000.000.000	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	Sub-Region	Penyusunan dan Pengiriman Dokumen Pembelajaran Daring	0	47 - 2.000.000.000.000	

[illegible]

2.5. PESELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan BPKAD Kabupaten Sanggau.

Mengingat BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel.

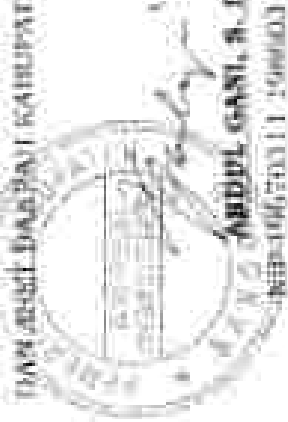
Untuk selanjutnya, program dan kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
 Kabupaten Sanggau
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-		-	-	-	-

Sanggau, 15 Agustus 2023

MUAKHILA PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



ABDEL GANI, S. JP
 NIP-1967031119900310001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa Kebijakan Nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan Pemerintah Daerah termasuk Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan;
4. Percepatan dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goal's* (MDG's).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai visi daerah, aspirasi, dan dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (Tahun 2014-2019), maka visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2019-2024 adalah:

" SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN "

Adapun makna dari visi tersebut yaitu:

1. **MAJU** keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik, dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis.

2. **TERDEPAN** dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sanggau lebih memprioritaskan melayani masyarakat dan membangun desa sehingga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan berdasar pada **IMAN dan TAKWA**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau pengjabaran dari misi BPKAD Kabupaten Sanggau dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Dimana tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya ung dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.

4. Meningkatkan ketertarikan dan ketertihan melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional.
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada misi ke tiga yaitu ***"Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik."***

Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2024 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp303,808,726,632.28.

Berikut terlampir Tabel yang berisi Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Maju Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

Susunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 dan Pelaksanaan Majo Tahun 2023 Kabupaten Banggai

Rencana Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ambar 0101

Kode	Uraian/Detail Uraian Pembelangan Denda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun					Catatan Revisi	Pelaksanaan Majo/ Rencana Tahun	
			2024						2023	
			Indikator	Target Capaian Majo	Estimasi Dana/ Peng- anggaran	Bantuan Dana	Target Capaian Majo		Estimasi Dana/ Peng- anggaran	
111	III	CII	III	II	20	11	20	10	100	
5.02.01	PROGRAM PEMURUJANG DEKRAK PCH CEBUTAN DASAR	Pemutuan Intervensi Iyem Ekon penguat pemerataan bidag maka koreksi	Eak. Sungsang		Rp 1.000.000.000.00	APBD Sub- Sungsang			Rp 1.000.000.000.00	
5.02.01.1.01	Pemutuan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Manula Pengungsi Daerah	Pemutuan pemerataan dan pemerataan dan rehabilitasi Manula pengungsi daerah yang terancam dengan baik dan dapat stabil	Eak. Sungsang	12 Dokumen	Rp 88.120.000.00	APBD Sub- Sungsang		12 Dokumen	Rp 88.120.000.00	
5.02.01.1.01.01	Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Eak. Sungsang	3 Dokumen	Rp 12.000.000.00	APBD Sub- Sungsang		3 Dokumen	Rp 12.000.000.00	
5.02.01.1.01.02	Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Eak. Sungsang	1 Dokumen	Rp 2.000.000.00	APBD Sub- Sungsang		1 Dokumen	Rp 2.000.000.00	
5.02.01.1.01.03	Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Eak. Sungsang	1 Dokumen	Rp 12.000.000.00	APBD Sub- Sungsang		1 Dokumen	Rp 12.000.000.00	
5.02.01.1.01.04	Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pengembangan dan Pengembangan dan	Eak. Sungsang	1 Dokumen	Rp 12.000.000.00	APBD Sub- Sungsang		1 Dokumen	Rp 12.000.000.00	

[illegible]

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	
-------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Survei Tahun 2024				Catatan Pembelian	Rencana 2025	
			Lokasi	Tingkat Capaian Kegiatan	Solusi/ Dampak/ Rupa Rukun	Berkas Data		Target Capaian Rencana	Estimasi Biaya/ Rupa Rukun
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.02.01.1.07	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.07.01	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.08	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.08.01	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.08.02	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.09	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.09.01	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32
5.02.01.1.09.02	Pengadaan Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Pemertanian Bawang Putih Daerah Pemeringan Daerah Persekitaran Daerah	Kab. Banggai	20 Unit	Rp 103.818.876.00	APRO Sub-Banggai		20 Unit	Rp 196.779.197.32

Kode	Visi/Strategi Utama Pemerintahan Daerah (dan Program/Kegiatan)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Pelaksanaan	Pembacaan Matriks (Berkas Teller)	
			Kategori	Tipe Kelembagaan	Estimasi Biaya (Rp)	Indikator Kinerja		Tipe Kelembagaan	Estimasi Biaya (Rp)
1.02.02.1.01	Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, meliputi: - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.02.02.1.01.01	1.02.02.1.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.01.01.01.01.01.01.01.01
1.02.02.1.02	Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, meliputi: - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.02.02.1.02.01	1.02.02.1.02.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01
1.02.02.1.03	Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, meliputi: - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah - Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.02.02.1.03.01	1.02.02.1.03.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01.01.01.01.01	1.02.02.1.03.01.01.01.01.01.01.01.01

[illegible]

Berkas	Gedung/Building (Tempat Pelaksanaan Kegiatan)	Judul/Title Program/Program	Rencana Tahunan				Kategori Kegiatan	2023	
			Lokasi	Target Capaian/Keluaran	Komitmen Dana/Target Anggaran	Realisasi Dana/Target Anggaran			
111	117	111	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
112	118	112	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
113	119	113	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
114	120	114	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
115	121	115	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
116	122	116	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
117	123	117	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
118	124	118	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
119	125	119	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
120	126	120	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
121	127	121	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
122	128	122	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
123	129	123	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
124	130	124	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
125	131	125	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
126	132	126	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
127	133	127	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
128	134	128	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
129	135	129	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
130	136	130	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
131	137	131	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
132	138	132	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
133	139	133	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
134	140	134	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
135	141	135	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
136	142	136	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
137	143	137	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
138	144	138	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
139	145	139	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
140	146	140	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	APBD Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.803,00	
141	147	141	Kab. Sanggau	100%	Rp. 304.310.837.80				

[illegible]

Kode	Organisasi/Building Division Pembangunan Dams (English/English)	Inflation Rate (English/English)	Financial Table					Current Notes	Financial Table	
			2024						2025	
			Unit	Target Capacity (MW)	Minimum Data/ Price (MW)	Member Price	Target Capacity (MW)		Minimum Data/ Price (MW)	
01	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
2024.1.1.1.1.1	Population Perpetuation Building Milk Dams Population Building Milk Dams Population Building	21	21	21	21	21	21	21	21	
SUMMARY									2024.1.1.1.1.1	
2024.1.1.1.1.1									2024.1.1.1.1.1	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Dari seluruh sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2023 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Paksaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ❖ Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pengadaan Mebel

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Meubel lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi REA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - ❖ Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pelembagaan Anggaran Kas dan SPD
 - ❖ Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- ❖ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Verifikasi Pendapatan
 - ❖ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - ❖ Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Behan
 - ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - ❖ Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ❖ Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - ❖ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - ❖ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Standar Harga
 - ❖ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah

- ❖ Inventarisasi Barang Milik Daerah
- ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ❖ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ❖ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024,

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf korrah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja BPKAD Tahun 2024 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Demikian semoga Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau pada umumnya.